

DIALEKTIKA MINIMALIS DAN MAKSIMALIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA: PERSPEKTIF SEPARATE DAN CIVIC EDUCATION GLOBAL

Yayan Sahi

Universitas Negeri Gorontalo

Email:

yayansahi1999@gmail.com

Abstract:

The aim of this study is to explore the dialectics of minimalism and maximalism in Indonesian civic education, by comparing the "separate" perspective applied in Indonesia with the global approach to civic education. The research method used is a qualitative approach, focusing on literature study and content analysis to examine various civic education models across different countries. The findings reveal that civic education (PKn) in Indonesia still faces complexities in terms of its orientation and applied approach. The "separate" approach, which divides the cognitive, affective, and psychomotor domains in learning, has created a gap between civic education as a normative discourse and actual citizenship practice in the field. This approach results in citizens who possess basic knowledge, but lack participatory, critical, and reflective engagement. Compared to civic education in countries such as the United States, Finland, or South Korea, Indonesia's PKn approach tends to be minimalistic, focusing more on mastering normative content. Meanwhile, global civic education leans toward fostering active and deliberative citizens within participatory democracies. The conclusion of this study is that a reformulation of civic education in Indonesia is essential. A transition from the "separate" model to a more contextual, participatory, and relevant "maximal" model is necessary to address the challenges of the digital democracy era and Indonesia's socio-cultural diversity. The recommendations of this study emphasize the need to strengthen civic competencies in Indonesian civic education, such as civic literacy, political efficacy, and social responsibility.

Keywords: Civic Education, Dialectics of Minimalism and Maximalism, Separate

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dialektika minimalis dan maksimalis dalam pendidikan kewarganegaraan Indonesia, dengan membandingkan perspektif "separate" yang diterapkan di Indonesia dengan pendekatan civic education global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan fokus pada studi literatur dan analisis konten untuk menggali berbagai model pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia masih menghadapi kompleksitas dalam hal orientasi dan pendekatan yang diterapkan. Pendekatan "separate" yang memisahkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran telah menciptakan jarak antara pendidikan kewarganegaraan sebagai wacana normatif dan praktik kewargaan yang sesungguhnya di lapangan. Pendekatan ini menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan dasar, namun kurang partisipatif, kritis, dan reflektif. Dibandingkan dengan civic education di negara-negara seperti Amerika Serikat, Finlandia, atau Korea Selatan, pendekatan PKn Indonesia cenderung minimalis dan lebih fokus pada penguasaan materi normatif. Sementara itu, civic education global lebih mengarah pada pembentukan warga negara yang aktif dan deliberatif dalam demokrasi partisipatoris. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa reformulasi konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat dibutuhkan. Diperlukan transisi dari model "separate" ke model "maksimal" yang lebih kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan tantangan zaman, seperti demokrasi digital dan keberagaman sosial budaya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan keterampilan civic competencies dalam pendidikan kewarganegaraan Indonesia, seperti literasi sipil, efikasi politik, dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Dialektika Minimalis dan Maksimalis, Separate

PENDAHULUAN

Jauh sebelum mengulas topik yang akan dikaji dalam riset ini, peneliti perlu mengkritisi paham bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hanya diajarkan pada level pendidikan sekolah menengah atas. Nampaknya, pada sisi ini terjadi sebuah kesenjangan (*gap*) yang perlu disikapi dengan bijak, terutama dalam menghadapi kondisi global yang tidak kondusif seperti sekarang. Artinya, muatan konten pembelajaran PKn seharusnya sudah dimulai dari semua tingkatan jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar, untuk mengokohkan semangat nasionalisme dan membangun kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini.

Pembelajaran PKn yang dimulai sejak usia dini dapat menjadi fondasi kuat dalam membentuk karakter warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, sekaligus mampu merespons tantangan global dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, PKn tidak hanya menjadi mata pelajaran formal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi yang tangguh, kritis, dan berwawasan global tanpa kehilangan identitas nasionalnya.

Secara eksplisit Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1, 3, dan 5 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, usaha pertahanan dan keamanan negara, serta mendapatkan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga dengan tentang Sistem Pendidikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih lanjut, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan PKn merupakan salah satu bagian yang menjadi instrumen penting untuk membentuk kepribadian sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang pendidikan kewarganegaraan di tingkat dasar, menengah, dan tinggi dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang menguatkan karakter kebangsaan. Sehingga, dalam tataran PKn sebagai "*keilmuan, instrumenasi dan praksis pendidikan yang utuh,*" luaranya dapat menumbuhkan *civic intelligence, civic participation serta civic responsibility*. Untuk itu, kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma;

(1) Secara kurikuler

PKn merupakan subjek pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensi individu;

(2) Secara teoritik PKN

di rancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat unsur-unsur muatan kognitif, afektif dan psikomotorik yang sifatnya "*konfulen*" artinya saling berpenetrasi dan terintegrasi;

(3) Secara Progmatic

PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang lebih menekankan pada isi yang menganudng nilai-nilai (*conten embeding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*). (Putra and Bidmansyah 2012).

Dapat dikonstruksikan bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan (PKb) berperan sentral dalam mengembangkan kesadaran kewarganegaraan yang berdaya di tingkat lokal, nasional, dan global. Pada skala lokal, PKN mengarahkan peserta didik untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam nilai-nilai, sejarah, dan kekayaan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas mereka, yang pada gilirannya memperkuat fondasi identitas nasional dan meningkatkan kebanggaan terhadap warisan budaya.

Di ranah nasional, PKN bertindak sebagai katalisator dalam proses pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, melalui penyemaian pemahaman akan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam konteks sosial-politik, serta penguatan

pengetahuan mengenai sistem politik dan pemerintahan negara. Sementara itu, di panggung global, PKN memperkenalkan peserta didik pada isu-isu global yang mendesak, seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan, yang memiliki relevansi yang sangat penting dalam membentuk pandangan dunia yang inklusif.

Harus diakui, persoalan pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKN yang berorientasi pada konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" dalam nuansa lokal, nasional, dan global bukan merupakan hal yang mudah. Realitas saat ini, khususnya kurikulum pendidikan di indonesia selalu saja mengalami perubahan baik dari sisi muatan "*materil*" dimana merujuk pada komponen-komponen fisik atau konkret dari kurikulum, seperti silabus, buku teks, dan materi pelajaran yang diajarkan di kelas. Sementara itu, muatan "*imateril*" mengacu pada aspek-aspek non-fisik seperti tuntutan terhadap nilai-nilai, sikap, keterampilan sosial, karakter, dan kemandirian yang ingin ditanamkan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran.

Untuk itu, hemat penulis kurikulum merupakan sautu instrumen atau acuan yang memuat isi, tujuan, metode serta acuan proses pembelajaran baik dalam satuan pendidikan "*formal*" maupun "*non formal*". Secara substansial sederhananya kurikulum adalah seperangkat aturan perihal aspek yang terkait dengan apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajar, dan bagaimana hasil pembelajaran akan dinilai. Schubert, (1986) menyatakan;

"curriculum as content or subject matter, curriculum as a program of planned activities, curriculum as intended learning outcomes, curriculum as cultural reproduction, curriculum as experience, curriculum as discrete task and concepts, curriculum as an agenda for social reconstruction".(Raharjo 2020)

Pernyataan ini dapat diterjemahkan bahwa kurikulum sebagai isi atau materi pelajaran, kurikulum sebagai program kegiatan yang direncanakan, kurikulum sebagai hasil pembelajaran yang diharapkan, kurikulum sebagai reproduksi budaya, kurikulum sebagai pengalaman, kurikulum sebagai tugas dan konsep yang terpisah, kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial.

"Stratemeyer, Forkner & McKim (194) bahwa "Curriculum currently defined in three ways; the courses and class activities in which children and youth engage; the total range of in class and out class experiences sponsored by school; and the total life experiences of the learner".(Raharjo 2020)

Artinya kurikulum saat ini didefinisikan dalam tiga cara;

- (1) Kursus dan kegiatan kelas yang melibatkan anak-anak dan remaja;
- (2) Total rentang pengalaman di kelas dan di luar kelas yang disponsori oleh sekolah; dan;
- (3) Total pengalaman hidup orang yang lebih ramping.(Raharjo 2020).

Berkenaan dengan hal ini Nasution, (1995:1) menuturkan kurikulum memegang

peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif, interaktif, dan kondusif. (Raharjo 2020)

Di Indonesia, perubahan kurikulum sudah terjadi perubahan beberapa kali. dimulai dari Kurikulum 1947 yang menjadi fondasi pendidikan nasional pasca-kemerdekaan, kemudian Kurikulum 1964 yang menghadirkan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) dengan penekanan pada pendidikan umum dan kejuruan. Pada era Orde Baru, Kurikulum 1975 diluncurkan dengan fokus pada kurikulum wajib termasuk pendidikan agama, moral, dan kewarganegaraan. Masuk ke era reformasi, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 1994 menonjolkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum 2004 (KTSP) memperkuat pendekatan berbasis kompetensi sambil menekankan pengembangan kurikulum oleh masing-masing satuan pendidikan.

Selanjutnya kurikulum 2006 yang memberikan penekanan pada keberhasilan dalam bidang akademik maupun karakter. Kemudian kurikulum 2013 (K13) yang memperkenalkan pembelajaran kontekstual dan terintegrasi dengan penekanan pada karakter, literasi, dan numerasi. Terakhir, Kurikulum Merdeka Belajar yang diperkenalkan pada 2020 memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menariknya juga, model khusus untuk kurikulum PKN juga mengalami perubahan untuk sisi penamaannya dan unsur muatan yang hendak ingin dicapai.

Hal itu tergambarkan dari beberapa fase perbuahan dan unsur muatannya sebagai berikut; *Pertama*, Kurikulum 1975: Muatan pembelajaran pada kurikulum ini mencakup pembahasan civics, sejarah kebangsaan, kejadian setelah Indonesia merdeka, UUD 1945, masing-masing sila Pancasila, serta pesan pentingnya pembangunan bagi bangsa Indonesia. Kurikulum ini diakui pada tahun 1975. *Kedua*, P4 Tahun 1979: Kurikulum ini menekankan penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) dengan memasukkan materi tentang hak asasi manusia, azas dan makna keadilan, lembaga-lembaga negara, badan peradilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, serta kajian terhadap Pancasila itu sendiri. Diterapkan pada tahun 1979. *Ketiga*, Kurikulum 1984: Muatan pembelajaran pada kurikulum ini meliputi nilai, moral, norma, perilaku yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dikenalkan pada tahun 1984.

Keempat, Kurikulum 1994: Dikenal dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kurikulum ini menekankan pembudayaan nilai-moral secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional. Materinya mencakup nilai-nilai Pancasila, kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah kesatuan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mulai

diterapkan sejak tahun 1994. *Kelima*, Dalam Kurikulum 2004, PPKn tetap mempertahankan muatan pembelajaran yang mencakup pengenalan terhadap nilai-nilai Pancasila, pemahaman tentang UUD 1945, serta pembelajaran tentang sejarah, sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan Indonesia. Namun, pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum 2004 cenderung lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. *Keenam*, Kurikulum 2006: Kurikulum ini mengintegrasikan PPKn ke dalam mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok). Meskipun tidak lagi menjadi mata pelajaran mandiri, muatan PPKn masih mempertahankan esensi pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai Pancasila, dan pemahaman tentang kewarganegaraan. Kurikulum 2006 diterapkan sejak tahun 2006.

Ketujuh, Kurikulum 2013: PPKn menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum ini, yang menekankan pembelajaran kontekstual, ilmiah, dan terintegrasi. Selain memahami nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, siswa juga diajak untuk mengembangkan karakter, literasi, dan keterampilan kewarganegaraan. Kurikulum ini diperkenalkan pada tahun 2013. *Kedelapan*, Kurikulum Merdeka Belajar: Dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar, muatan PPKn terus menekankan pentingnya pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai Pancasila, dan pemahaman tentang kewarganegaraan. Namun, dengan pendekatan fleksibel dan berbasis kompetensi, sekolah memiliki keleluasaan dalam merancang pembelajaran yang lebih

relevan dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar diimplementasikan sejak tahun 2020.

Pun demikian juga, Winarno (2013,) menuturkan beberapa perkembangan penggunaan istilah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia antara lain sebagai berikut. (1). Kewarganegaraan tahun 1957 (2). Civics sebagai pengganti Kewarganegaraan tahun 1961 (3). Pendidikan Kewargaan Negara tahun 1968 (4). Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tahun 1975 dan 1984 (5). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 (6). Kewarganegaraan (Civic) tahun 2004 (uji coba kurikulum berbasis kompetensi), dan (7). Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis konten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis dua pendekatan utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia, yaitu pendekatan "separate" yang berorientasi pada nilai-nilai nasionalisme dan identitas lokal, serta pendekatan Civic Education Global yang menekankan perspektif global dan keterlibatan warga negara dalam isu-isu internasional.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang meliputi dokumen resmi seperti kurikulum PKn dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), buku teks

PKn yang digunakan di berbagai jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), serta kebijakan pendidikan terkait PKn seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan panduan implementasi kurikulum. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur akademis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan dan Kelemahan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dalam Pendekatan "*Separate*" dibandingkan Civic Education di Berbagai Negara.

Keberadaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang masuk dalam pendekatan "*separate*" wajib untuk semua jenjang, juga diikuti oleh beberapa negara-negara lain seperti di Singapura, yang dimana pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan sebagai bagian integral dari mata pelajaran "*Civics and Moral Education*", dengan fokus utama pada pengembangan karakter, nilai-nilai moral, dan kesadaran kewarganegaraan siswa. Sementara itu, di Hongaria, terdapat mata pelajaran yang disebut "*Civic and Ethical Education*" yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik kepada siswa. Di Prancis, pendidikan kewarganegaraan disampaikan melalui mata pelajaran "*Éducation Civique, Juridique et Sociale*", yang mencakup aspek-aspek seperti sistem politik, hak asasi manusia, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Sementara itu, di Italia, pendidikan kewarganegaraan diajarkan melalui mata

pelajaran "*Educazione Civica*" yang membahas tentang konstitusi Italia, sistem politik, dan hak serta kewajiban warga negara.

Di Jepang, sendiri materi pengajaran kewarganegaraan disampaikan melalui mata pelajaran "*Civics*" atau "*Society and History*" yang menekankan pada sejarah, budaya, dan sistem politik Jepang, serta nilai-nilai kewarganegaraan. Sementara itu, di Korea Selatan, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran "*Civic Education*" yang mencakup topik seperti sejarah, politik, dan hak asasi manusia. di Belanda, pendidikan kewarganegaraan disampaikan melalui mata pelajaran "*Burgerschap*" yang bertujuan untuk mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, pluralisme budaya, dan partisipasi politik. Di Selandia Baru, pendidikan kewarganegaraan disampaikan melalui mata pelajaran "*Social Studies*" yang mencakup topik-topik seperti sejarah, budaya, sistem politik, dan isu-isu sosial. Sedangkan di Amerika Serikat, pendidikan kewarganegaraan disampaikan melalui program-program seperti "*Civics Education*" yang bertujuan untuk mengajarkan siswa tentang konstitusi, pemerintahan, dan partisipasi politik. (Putra and Bidmansyah 2012).

Selanjutnya PKN juga di aktualisasikan di Selandia Baru. Menurut Barr (1998) menulis dalam artikelnya yang berjudul "Kewarganegaraan Tanpa Buku Teks" pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru tidak menjadi bidang kurikulum wajib. (Nurlatifa, Zai, and Samsuri 2023). Namun seiring dengan berjalannya waktu

justeru kajian yang dilakukan oleh Mutch (2003) & Milligan, Taylor, E. Wood; (2011) Pengajaran tentang pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru dimuat secara umum dalam tiga kurikulum yaitu kurikulum ilmu sosial, kurikulum kesehatan dan pendidikan jasmani, serta kurikulum pendidikan lingkungan. (Nurlatifa et al. 2023).

Jika merujuk pada Kerr, berbagai negara memiliki pendekatan yang beragam terhadap pendidikan kewarganegaraan, yang mencakup bidang-bidang seperti kewarganegaraan, ilmu sosial, studi sosial, studi dunia, studi masyarakat, keterampilan hidup, dan pendidikan moral. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru saat ini, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai, pendidikan lingkungan, dan kesehatan juga dapat dianggap sebagai bagian dari pendekatan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Terlepas dari beberapa penggunaan istilah pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Hal yang harus diberikan apresiasi adalah substansi "**kekuatan**" pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang memiliki domain utama yakni tentang pendidikan, politik dan hukum. Pun jika telaah lebih jauh, sebetulnya kekuatan utama pendidikan PKN dapat diklasifikasikan atas dua hal *Pertama*, dalam penyebutan *citizenship education* secara substansi dan *pedagogis* PKN di Indonesia desain guna mengembangkan kepribadian kewarganegaraan yang cerdas.

Hingga saat ini, meskipun telah terjadi perubahan kurikulum PKN di Indonesia, tapi hemat penulis hal itu hanya berubah dari sisi penamaanya saja akan tetapi secara isi yang

diajarkan masih memiliki orientasi yang sama. Sehingga, dari kesamaan orientasi itu, pendidikan PKn dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Bahkan, PKn dijadikan juga sebagai mata kuliah wajib serta merupakan bagian dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang mampu membentuk kepribadian guru. *Kedua*, kerangka dasar sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kurkuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang berusaha untuk mengembangkan potensi agar bisa menjadi warga negara yang berakhlak, cerdas, berpartisipasi, bertanggung jawab. Pun secara teori, subjek pembelajaran PKn memuat dimensi kognitif, afekti, dan psikomotorik. Hal yang begitu menarik dari sisi yuridis, pendidikan PKn ditopang dengan berbagai regulasi. Sehingga, tidak akan berpotensi dihapuskan dalam muatan pelajaran disemua jenjang. Tentunya kelebihan PKn sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang memiliki keunggulan dari negara-negara lain. Misalnya sabagi bahan perbandingan di Jepang, Pakistan, Cina, Hongkog.

Untuk itu, kekuatan dari pendidikan kewarganegaraan di indonesia termasuk ke dalam pendekatan "*separate*" dengan sifat dan kedudukan wajib bagian dari program inti" untuk semua tingkat, dibandingkan dengan civic/citizenship education di berbagai negara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabe 1.

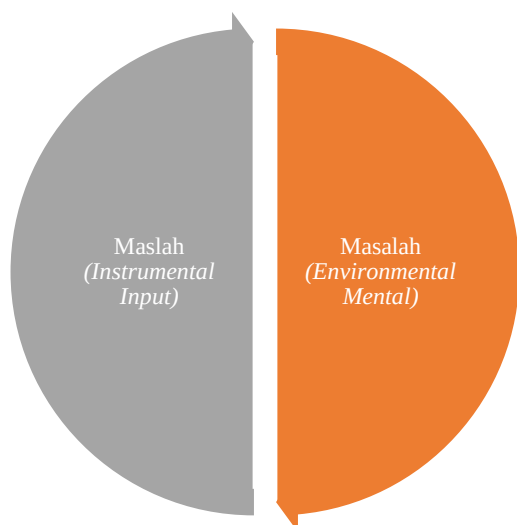
Kekuatan dari Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Aspek	Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
Wajib di Semua Tingkatan	Diwajibkan di semua tingkatan pendidikan.
Fokus pada Nilai Pancasila	Menekankan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Pembentukan Karakter	Selain memberikan pemahaman tentang sistem politik dan hukum, juga membentuk karakter dan moral siswa.
Partisipasi Demokratis	Mendorong partisipasi demokratis siswa melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam proses politik.

Dalam tabel tersebut dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan, termasuk kewajiban di semua tingkatan pendidikan, fokus pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan karakter siswa, dan mendorong partisipasi demokratis. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari sistem pendidikan Indonesia untuk membentuk warga negara yang berkualitas, bertanggung jawab, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, dan nilai-nilai kewarganegaraan.

Juga patuh untuk diakui, meskipun konsep indkotrinasi ideologi kewarganegaraan kepada peserta didik sudah dilakukan di semua jenjang, pun penididkan PKn di indonensia masih banyak memiliki "keterbatasan atau

kelemahan.” Kelemahan itu dapat dikategorikan melalui dua hal juga yakni;



Tinjauan masalah pada pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia menggambarkan dua dimensi utama yang mempengaruhi efektivitasnya: masalah instrumen input dan masalah lingkungan mental. (Putra and Bidmansyah 2012) Masalah instrumen input, pertama-tama, mencakup kurangnya kualitas guru/dosen serta keterbatasan fasilitas ruang dan sumber belajar. Sementara itu, masalah lingkungan mental meliputi beberapa aspek. Pertama, penilaian dalam pembelajaran PKn lebih cenderung menekankan dampak instruksional, khususnya pada aspek kognitif, dan kurang memberikan perhatian pada dimensi afektif dan psikomotorik serta dampak penggiringan (hidden curriculum).

Kedua, dari segi pengelolaan kelas, masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan para pengajar untuk mengoptimalkan konten pembelajaran sehingga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini juga menyebabkan kurangnya kegiatan belajar proaktif dan

interaktif di dalam maupun di luar kelas, sehingga pengalaman belajar siswa belum optimal. Ketiga, dari perspektif pedagogis, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler belum efektif sebagai mediasi antara teori dan praktik dalam memfasilitasi siswa untuk menguasai materi. Kesimpulannya, kekurangan dalam pendidikan PKn di Indonesia, dibandingkan dengan negara lain, terutama terletak pada aspek kurikuler dan sosio-kultural dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kerangka yuridis, seperti sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan yang Ideal dalam Konteks Indonesia, MINIMAL or MAKSIMAL.

Untuk menentukan apakah pendidikan kewarganegaraan sudah berada pada level minimal atau maksimal, sekiranya perlu didefinisikan terlebih dahulu. Pendidikan PKn dalam konteks “*minimal*” secara sempit dipahami bahwa PKn hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran dimana hasilnya mudah diukur. Sedangkan secara maksimal PKn didefinisikan secara luas yang dimana mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan secara formal dan informal, diberi label “*citizenship education*” yang menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif didalam maupun diluar kelas, hasilnya akan lebih sukar dicapai dan diukur karena

kompleksnya hasil belajar.(Putra and Bidmansyah 2012).

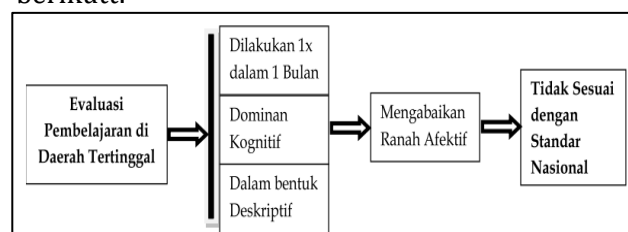
Dari urian itu, justru dalam kapasitas maksimal pendidikan PKn belum memenuhi kriteria. Dalam artian, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia cenderung memperlihatkan karakteristik yang lebih condong ke arah level minimal. Parameter itu didasarkan pada realitas *Pertama*, dalam pendekatan pembelajaran, Indonesia masih menerapkan pendekatan yang tradisional, yang lebih menitikberatkan pada pengajaran formal dan mengikuti isi kurikulum yang telah ditetapkan. Hal ini mengimplikasikan bahwa siswa lebih sering menjadi penerima informasi daripada aktor aktif dalam pembentukan pemahaman. *Kedua*, terkait integrasi kurikulum, kurangnya keterkaitan kurikulum dengan konteks sosial siswa menjadi perhatian utama. Kurikulum PKn di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dengan realitas sosial siswa, sehingga pemahaman yang diperoleh seringkali kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan tuntutan secara prosedural kepada tenaga pengajar yang berimplikasi pengajaran cenderung terabaikan.

Ketiga, pelatihan guru juga menjadi sorotan, dengan keterbatasan dalam pengembangan pendekatan pembelajaran inovatif. Pelatihan guru di bidang PKn masih terbatas dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis partisipatif. *Terakhir*, evaluasi pembelajaran cenderung terfokus pada aspek kognitif, dengan kurangnya penekanan pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai

kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi pembelajaran PKn di Indonesia masih belum mencerminkan secara menyeluruh pemahaman siswa tentang konsep-konsep kewarganegaraan dan nilai-nilai yang terkait.

Dari tiga aspek tersebut, klaim terkait level minimal juga bertumpu pada perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan antara daerah yang maju dan daerah yang terbelakang. Jika ada klaim yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mencapai tingkat maksimal, maka pertanyaannya adalah bagaimana kondisi di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas, sumber daya manusia guru, dan infrastruktur yang memadai. Argumentasi ini juga didasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh Zulfaidi (2016) dan Indrawati (2016) yang menemukan hal yang sama bahwa kurangnya persiapan perencanaan pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif, dominasi peran guru dalam proses pembelajaran, dan kompleksitas masalah pembelajaran di daerah-daerah tertinggal yang disebabkan oleh minimnya fasilitas dan rendahnya SDM siswa membuat pendidikan PKn tidak berjalan secara maksimal.(Hasanah, Indrawadi, and Montessori 2020).

Hal itu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Hambatan Pendidikan Kewarganegaraan di Daerah Tertinggal.

Di daerah terpencil, pendidikan PPKn masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait kualitas guru yang jauh di bawah standar nasional pendidikan Indonesia. Dalam perencanaan pembelajaran, guru belum memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai panduan utama dalam mengajar. Selama proses pembelajaran, guru cenderung menggunakan pendekatan yang monoton dan kurang mampu mengembangkan metode pembelajaran yang menarik karena terbatasnya sumber daya belajar dan minimnya pengetahuan tentang penggunaan media yang interaktif. Di sisi lain, dalam melakukan evaluasi pembelajaran, guru seringkali hanya memperhatikan aspek kognitif siswa tanpa memperhitungkan secara menyeluruh perkembangan afektif mereka. (Hasanah et al. 2020)

Apabila di bandingkan dengan daerah yang lebih maju secara perkotaan, biasanya terdapat lebih banyak sumber daya pendidikan, seperti fasilitas sekolah yang lebih baik, akses yang lebih mudah terhadap teknologi, dan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembelajaran. Guru di daerah tersebut mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan dan dukungan profesional. Siswa juga mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap bahan pembelajaran yang berkualitas dan beragam. Hal ini bisa mengakibatkan pembelajaran yang lebih terstruktur, beragam, dan efisien di daerah-daerah yang lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang maju.

Dengan berbagai perbedaan tersebut, hemat penulis berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat mencapai tingkat optimal jika lingkungan belajar didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain. Dengan demikian, kemampuan kewarganegaraan seperti pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan disposisi kewarganegaraan dapat diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia.

Rekomendasi Konseptual Susunan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKN Yang Berorientasi Ada Konsep “Contextualized Multiple Intelligence” dalam Nuansa Lokal, Nasional, dan Global Guna Mencapai Pendidikan PKN yang Maksimal.

Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah yang mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan. (Wibowo and Wahono 2017).

Korelasi antara perubahan dalam pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih multidimensional dan adanya evolusi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) terletak pada penyesuaian kurikulum untuk

mencerminkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Perubahan dalam pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih multidimensional, yang mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, pemahaman tentang keadilan, partisipasi aktif, pemahaman tentang kebudayaan, dan keterampilan berpikir kritis, menuntut penyesuaian dalam kurikulum PKn untuk memastikan relevansinya dalam membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk berperan aktif dalam masyarakat yang semakin kompleks ini.

Sanusi, (1999: 5-6) Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor valuebased education dan mengemban misi civic education for democraton, sehingga pendidikan kewarganegaraan hendaknya mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi, yakni demokrasi, hak- hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya (supremacy of law/rule of law) yang didasarkan pada sepuluh pilar demokrasi (The ten pillars of Indonesian constitutional democracy), meliputi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) hak asasi manusia; (3) kedaulatan rakyat; (4) kecerdasan rakyat; (5) pemisahan kekuasaan negara; (6) otonomi daerah; (7) supremasi hukum (rule of law); (8) peradilan yang bebas; (9) kesejahteraan rakyat; dan (10) keadilan sosial. (Febrianti 2020)

Pembelajaran pendidikan kewarganegara-an berorientasi pada konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" dapat

dipahami suatu cara yang dapat dilakukan untuk membuka pandangan tentang perlunya penanganan pembelajaran yang lebih kreatif, aktif- partisipatif, menggali dan mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan potensi atau kecerdasan orisinialnya, bermakna dan menyenangkan. Sehingga, untuk merealisasikannya dibutuhkan penerapan *contextual teaching and learning* dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Artinya, *Contextual teaching and learning* (CTL) adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan penggunaan konteks nyata dan relevan untuk membantu siswa memahami dan menerapkan konsep-konsep pembelajaran. Pendekatan ini mengintegrasikan pengalaman hidup siswa, lingkungan sekitar, serta kebutuhan dan minat mereka ke dalam proses pembelajaran. CTL berfokus pada menciptakan situasi pembelajaran yang berhubungan erat dengan kehidupan nyata siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat keterampilan belajar yang berkelanjutan. Dengan CTL, siswa didorong untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks praktis, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap materi pelajaran.

Untuk itu, pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn yang berorientasi pada konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" dalam nuansa lokal, nasional, dan global hemat

penulis perlu dilakukan pembaharuan dari sisi unsur muatan pembelajarannya. Sekiranya, selama ini pendidikan pancasila dan kewarganegaraan jika baru dimulai dalam level SD maka, untuk mengembangkan kurikulum yang ada *“hemat peneliti”* pendidikan PKn harus diperkenalkan juga ditingkatkan pendidikan TK dan Paud. Adapun model pengembangan kurikulum pembelajaran PKn yang berorientasi pada konsep *“Contextualized Multiple Intelligence”* di berbagai jenjang penulis mensimulasikan unsur mutan pengembangan dan pembelajarannya sebagai berikut:

Tabel 1.

Rekomendasi Susunan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn yang Berorientasi Pada Konsep *“Contextualized Multiple Intelligence”* di Tingkatan Satuan Pendidikan TK/Puad

Unsur Muatan	Pengembangan Kurikulum PKn	Pembelajaran PKn
	PAUD/TK	PAUD/TK
Konteks Lokal	Memperkenalkan nilai-nilai dasar kebersamaan dan kerjasama melalui aktivitas bermain yang terintegrasi dengan budaya lokal.	Menggunakan cerita atau lagu-lagu tradisional dalam pembelajaran untuk mengajarkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal.
Konteks Nasional	Mengenalkan simbol dan lambang negara serta	Memperkenalkan konsep sederhana tentang persatuan dan kesatuan

memperkenalkan Indonesia melalui keanekaragaman cerita atau budaya Indonesia. permainan edukatif.

Konteks Global	Mengajarkan konsep dasar tentang kerjasama internasional dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya di dunia.	Memperkenalkan gambaran sederhana tentang negara-negara lain dan mengajarkan tentang nilai-nilai kerjasama global.
-----------------------	---	--

Untuk pengimplementasian susunan pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn yang berorientasi pada konsep *“Contextualized Multiple Intelligence”* di tingkat PAUD/TK memerlukan pendekatan yang kreatif dan beragam. Untuk konteks lokal, pendekatan yang melibatkan aktivitas bermain yang terintegrasi dengan budaya lokal dapat membantu mengenalkan nilai-nilai dasar kebersamaan dan kerjasama kepada anak-anak. Sementara itu, dalam konteks nasional, pengenalan simbol-simbol negara dan keanekaragaman budaya Indonesia bisa dilakukan melalui cerita atau lagu-lagu yang menarik minat mereka. Di sisi lain, untuk konteks global, konsep dasar tentang kerjasama internasional dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya di dunia dapat diperkenalkan melalui cerita dan gambar-gambar yang menggambarkan kerjasama antarnegara dalam mengatasi masalah global. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan menarik sesuai dengan perkembangan anak usia dini, implementasi ini dapat membantu

meningkatkan pemahaman anak-anak tentang nilai-nilai lokal, nasional, dan global dalam pembelajaran PKn di tingkat PAUD/TK. Selanjutnya pada level SD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Rekomendasi Susunan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn yang Berorientasi Pada Konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" di Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Unsur Muatan	Pengembangan Kurikulum PKn	Pembelajaran PKn
	SD	SD
Konteks Lokal	Menyertakan pengalaman dan keahlian siswa dalam pengembangan kurikulum untuk pembelajaran yang relevan.	Aktivitas pembelajaran menarik minat siswa dengan proyek lokal atau eksplorasi budaya setempat.
Konteks Nasional	Menyisipkan isu-isu nasional penting, seperti pembangunan ekonomi atau keadilan sosial, dalam kurikulum.	Pengajaran yang memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran untuk memahami realitas nasional.
Konteks Global	Mengenalkan isu-isu global relevan, seperti perubahan iklim atau perdamaian dunia, melalui pembelajaran.	Pembelajaran yang menantang siswa untuk memikirkan solusi terhadap masalah global dalam pembelajaran.

konteks lokal mereka.

Padala level SMP, susunan pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn yang berorientasi pada konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" di tingkat Sekolah Dasar (SD) memerlukan strategi yang sesuai dengan perkembangan anak-anak pada usia tersebut. Untuk konteks lokal, pengembangan kurikulum dapat melibatkan partisipasi siswa dalam menentukan materi pembelajaran yang relevan dengan realitas lokal mereka, seperti tradisi budaya, sejarah lokal, atau lingkungan sekitar. Pembelajaran PKn kemudian dapat dilakukan melalui beragam aktivitas yang menarik minat siswa, seperti eksplorasi lapangan, penelitian proyek, atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di daerah mereka. Konteks nasional, kurikulum dapat disusun dengan memasukkan isu-isu penting yang berkaitan dengan pembangunan negara, keadilan sosial, atau nilai-nilai nasional. Pembelajaran PKn dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran, seperti buku teks, video, atau narasi audio, yang membantu siswa memahami realitas nasional dengan lebih baik.

Sementara itu, dalam konteks global, kurikulum dapat mengenalkan isu-isu global yang relevan, seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, atau kerjasama internasional. Pembelajaran PKn dapat dirancang untuk menantang siswa dalam memikirkan solusi terhadap masalah-masalah global tersebut, dengan mempertimbangkan dampaknya pada konteks lokal mereka. Ini

dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, simulasi, atau proyek kolaboratif yang menggugah kecerdasan dan pemikiran kritis siswa. Dengan pendekatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak pada tingkat SD, implementasi ini akan membantu memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai lokal, nasional, dan global dalam pembelajaran PKn. Selanjutnya pada level SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.

Rekomendasi Susunan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn yang Berorientasi Pada Konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" di Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Unsur Muatan	Pengembangan Kurikulum PKn SMP	Pembelajaran PKn SMP
Konteks Lokal	Menyesuaikan kurikulum dengan lingkungan sekitar siswa, misalnya dengan mengintegrasikan tradisi lokal dalam pembelajaran.	Menggunakan contoh konkret dari lingkungan siswa dalam diskusi atau proyek pembelajaran.
Konteks Nasional	Mengenalkan isu-isu nasional yang penting, seperti pluralisme atau integrasi nasional, dalam kurikulum.	Memperdalam pemahaman siswa tentang sejarah nasional atau perkembangan politik di tingkat nasional.
Konteks Global	Memperkenalkan isu-isu global yang	Membandingkan masalah lokal

relevan, seperti hak asasi manusia atau perdamaian dunia, dalam pembelajaran. dengan isu-isu global dan mendiskusikan cara-cara untuk berkontribusi dalam skala global.

Untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn yang berorientasi pada konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan minat siswa yang sudah lebih matang. Untuk konteks lokal, pengembangan kurikulum dapat melibatkan siswa dalam mengeksplorasi dan memahami tradisi lokal mereka, yang kemudian diintegrasikan ke dalam pembelajaran PKn. Pembelajaran dapat dirancang dengan menggunakan contoh konkret dari lingkungan siswa, seperti studi kasus atau penelitian lapangan, untuk membuat materi pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi mereka. konteks nasional, kurikulum dapat disusun dengan memasukkan isu-isu penting yang berkaitan dengan keberagaman budaya, integrasi nasional, atau perkembangan politik di tingkat nasional.

Pembelajaran PKn kemudian dapat difokuskan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah nasional, sistem pemerintahan, atau nilai-nilai bangsa. dalam konteks global, kurikulum dapat mengenalkan isu-isu global yang relevan, seperti hak asasi manusia, perdamaian dunia, atau tantangan lingkungan. Pembelajaran PKn dapat dirancang untuk membandingkan masalah-masalah lokal

dengan isu-isu global dan mendorong siswa untuk berpikir secara kritis tentang cara mereka dapat berkontribusi dalam skala global, misalnya melalui proyek penelitian atau advokasi. Selanjutnya pada level SMA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Rekomendasi Susunan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn yang Berorientasi Pada Konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" di Tingkatan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Unsur Muatan	Pengembangan Kurikulum PKn	Pembelajaran PKn
	SMA	SMA
Konteks Lokal	Menyelaraskan kurikulum dengan realitas lokal, termasuk materi dengan studi kasus atau penelitian lapangan.	Menggunakan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan konteks lokal siswa, seperti diskusi tentang masalah lokal.
Konteks Nasional	Mengintegrasikan isu-isu nasional penting, seperti keberagaman budaya atau kesejahteraan sosial, ke dalam pembelajaran.	Memfasilitasi pemahaman siswa tentang isu-isu nasional melalui diskusi, penelitian, atau simulasi.
Konteks Global	Membahas isu-isu global, seperti perdamaian dunia atau tantangan lingkungan, untuk	Mendorong siswa untuk memikirkan implikasi global dari isu-isu tertentu dalam kehi

meningkatkan kesadaran siswa tentang keterkaitan global.

Implementasi susunan pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn yang berorientasi pada konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kedewasaan siswa serta relevansi materi dengan realitas sosial mereka. Untuk konteks lokal, pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menyelaraskan materi pembelajaran dengan realitas lokal siswa. Hal ini dapat mencakup pengayaan kurikulum dengan studi kasus atau penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan lingkungan sosial dan budaya tempat siswa tinggal. Dalam pembelajaran PKn, kegiatan diskusi atau proyek pembelajaran yang terkait dengan konteks lokal siswa dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang masalah-masalah lokal yang relevan.

Dalam konteks nasional, kurikulum dapat diintegrasikan dengan isu-isu nasional yang penting, seperti keberagaman budaya atau kesejahteraan sosial. Pembelajaran PKn di SMA dapat difasilitasi melalui diskusi, penelitian, atau simulasi yang mengajak siswa untuk memahami isu-isu tersebut secara holistik dan kritis, serta melihat implikasinya dalam konteks kehidupan bangsa. Untuk konteks global, pembelajaran PKn di SMA harus mencakup pembahasan isu-isu global, seperti perdamaian dunia atau tantangan lingkungan. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang keterkaitan global dan memberi mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Siswa juga perlu didorong untuk memikirkan implikasi global dari isu-isu tertentu dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi mereka dengan dunia luar. Selanjutnya pada level Mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabe 5.

Rekomendasi Susunan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn Yang Berorientasi Pada Konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" di Tingkatan Satuan Pendidikan Perguruan Tinggi (Mahasiswa)

Aspek Analisis	Pengembangan Kurikulum PKn Mahasiswa	Pembelajaran PKn Mahasiswa
Konteks Lokal	Menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal, misalnya dengan mengadakan seminar tentang masalah-masalah lokal.	Menggunakan studi kasus atau proyek penelitian yang berfokus pada isu-isu lokal, seperti pengembangan masyarakat lokal.
Konteks Nasional	Menyertakan isu-isu nasional penting, seperti demokrasi atau hak asasi manusia, dalam kurikulum.	Mendorong diskusi atau debat tentang isu-isu nasional, seperti kebijakan pemerintah atau perubahan sosial di tingkat nasional.

Konteks Global	Memasukkan isu-isu global yang signifikan, seperti perubahan iklim atau perdamaian dunia, dalam pembelajaran.	Mengorganisir pertemuan atau seminar internasional untuk membahas isu-isu global atau partisipasi dalam proyek global.
-----------------------	---	--

Untuk susunan pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn yang berorientasi pada konsep "*Contextualized Multiple Intelligence*" di tingkat Perguruan Tinggi (Mahasiswa) memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan pemahaman mahasiswa serta relevansi materi dengan konteks lokal, nasional, dan global. Pun konteks lokal, pengembangan kurikulum dapat disesuaikan dengan mengadakan seminar atau diskusi tentang masalah-masalah lokal yang relevan. Pembelajaran PKn dapat ditingkatkan melalui penggunaan studi kasus atau proyek penelitian yang fokus pada isu-isu lokal, seperti pengembangan masyarakat lokal atau penyelesaian masalah sosial di lingkungan sekitar.

Selain itu, secara konteks nasional, kurikulum perlu menyertakan isu-isu nasional penting seperti demokrasi, hak asasi manusia, atau kebijakan pemerintah. Pembelajaran PKn dapat didorong melalui diskusi atau debat tentang isu-isu tersebut, yang membantu mahasiswa memahami peran mereka dalam perkembangan sosial dan politik di tingkat nasional. konteks global, kurikulum harus memasukkan isu-isu global yang signifikan,

seperti perubahan iklim atau perdamaian dunia. Selain itu, mahasiswa juga perlu terlibat dalam kegiatan yang menghadapi tantangan global, seperti mengorganisir pertemuan atau seminar internasional, atau berpartisipasi dalam proyek global yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah global tersebut.

SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia masih menunjukkan kompleksitas dan dilema dalam hal orientasi, pendekatan, dan capaian idealnya. Pendekatan “separate” yang digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia yakni memisahkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara parsial dalam proses pembelajaran telah menciptakan jarak antara pendidikan kewarganegaraan sebagai wacana normatif dengan praksis kewargaan yang aktual di lapangan. Hal ini menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan dasar tentang negara dan konstitusi, tetapi kurang partisipatif, kritis, dan reflektif dalam kehidupan demokratis.

Jika dibandingkan dengan civic education di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Finlandia, atau Korea Selatan, pendekatan PKn Indonesia cenderung bersifat minimalis, yakni menekankan penguasaan materi normatif dan simbolik, namun belum menyentuh secara utuh penguatan civic competencies seperti civic literacy, political efficacy, maupun social responsibility. Civic education global justru mengarah pada pendekatan integratif dan praksis yang berorientasi pada pembentukan warga negara

aktif dan deliberatif dalam demokrasi partisipatoris.

Dengan demikian, reformulasi konseptual terhadap PKn di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Diperlukan transisi dari model pendidikan kewarganegaraan yang bersifat “separate” dan instruktif ke arah model “maksimal” yang lebih kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan tantangan demokrasi digital serta keberagaman sosial budaya Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan yang ideal bukan hanya mengajarkan identitas nasional dan norma konstitusional, tetapi juga menanamkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan deliberatif, serta sensitivitas terhadap isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Penelitian ini menegaskan bahwa arah kebijakan PKn di Indonesia harus diperkuat secara sistemik, baik dalam aspek kurikulum, pedagogi, maupun evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan terhadap struktur kurikulum dan materi ajar agar selaras dengan perkembangan civic education global, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan ideologis bangsa. Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan model PKn yang bukan hanya mengakar secara budaya, tetapi juga mampu membentuk warga negara yang cakap dalam demokrasi modern dan global.

DAFTAR RUJUKAN

- Febrianti, Nurul. 2020. *Kompetensi Kewarganegaraan*.
- Hasanah, Annisa, Junaidi Indrawadi, and Maria Montessori. 2020. “Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Di Daerah

Tertinggal." *Journal of Moral and Civic Education* 4(2):69-77. doi: 10.24036/8851412412020223.

Nurlatifa, Nurlatifa, Ronaldo Zai, and Samsuri Samsuri. 2023. "KAJIAN PKn: SELANDIA BARU DAN INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9(3):1693-1701. doi: 10.58258/jime.v9i3.5442.

Putra, Udin S. Winata, and Dasim Bidmansyah. 2012. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF INTERNATIONAL (KONTEKS TEORI, DAN PROFIL PEMBELAJARAN)*. Bandung.

Raharjo. 2020. "Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 Sampai Dengan Merdeka Belajar 2020." *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan* 15(1):63-82. doi: 10.20961/pknp.v15i1.44901.

Wibowo, Arif Prasetyo, and Margi Wahono. 2017. "Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret Memperkuat Multikulturalisme Di Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14(2):196-205. doi: 10.21831/civics.v14i2.16043.